

Judul : Kemendikdasmen batasi penggunaan gawai di sekolah, apakah efektif?
Tanggal : Sabtu, 01 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Kemendikdasmen Batasi Penggunaan Gawai Di Sekolah, Apakah Efektif?

Untuk hidup kembali ruang interaksi di lingkungan sekolah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan pembatasan penggunaan gawai. Langkah ini bertujuan membangun kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat sejak dini. Meskipun demikian, langkah Pemerintah ini mendapat beragam respons.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengatakan, lembaga

telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai. Dia menuturkan, tujuannya agar murid dapat dikontrol dan dibiasakan untuk tidak bergantung pada handphone.

"Sehingga sejak usia dini mereka terbiasa bahwa handphone itu hanya sebagai alat pendukung. Tidak ada ketergantungan yang berlebihan terhadap penggunaan gawai," ujarnya dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Menurut Fajar, pembatasan penggunaan gawai juga menjadi

bagian dari upaya menjaga kesehatan mental murid di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

"Pendidikan mengenal konsep Tri Pusat Pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekarang ada tambahannya, yakni empat pilar pendidikan yang harus kita sinergikan sebagai satu ekosistem," imbuhnya.

Langkah Kemendikdasmen ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah positif untuk mengembalikan

kualitas interaksi sosial peserta didik sekaligus membangun budaya digital yang lebih sehat di lingkungan digital.

"Kami melihat penggunaan gawai yang tidak terkendali dapat mengurangi konsentrasi belajar, membatasi interaksi sosial antarsiswa. Bahkan berpotensi memengaruhi kesehatan mental anak," ujar Kurniasih, Kamis (30/7/2026).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur menilai langkah Pemerintah tersebut sangat baik. Namun, kata dia, lebih

baik Pemerintah tidak sekadar mengeluarkan edaran pembatasan atau imbauan, melainkan secara tegas melarang siswa membawa gawai ke sekolah.

"Karena yang diatur adalah siswa boleh membawa HP, tetapi dikontrol oleh guru. Ini sudah pernah kami lakukan dan ternyata sangat menyulitkan," ungkap Mansur saat dihubungi *Rakyat Merdeka*, Jumat (31/7/2026).

Untuk mengetahui pandangan Kurniasih Mufidayati dan Mansur mengenai pembatasan penggunaan gawai di sekolah, berikut wawancaranya.

KURNIASIH MUFIDAYATI, Wakil Ketua Komisi X DPR

MANSUR, Sekjen FSGI

Ini Bagian Dari Ikhtiar Yang Perlu Didukung

Harusnya Bukan Sekadar Imbauan, Tapi Larangan



“Pembatasan tidak boleh dimaknai sebagai pelarangan total. Pemanfaatan teknologi tetap menjadi bagian dari proses pembelajaran dan perkembangan zaman.”

Apa pandangan Anda mengenai kebijakan Pemerintah membatasi penggunaan gawai di sekolah?

Kami menyambut baik terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 tersebut. Menurut saya, kebijakan ini merupakan langkah positif untuk mengembalikan kualitas interaksi sosial peserta didik, sekaligus membangun budaya digital yang lebih sehat di lingkungan sekolah.

Menurut Anda, apa dampak penggunaan gawai bagi peserta didik di sekolah?

Kami melihat penggunaan gawai yang tidak terkendali dapat mengurangi konsentrasi belajar, membatasi interaksi sosial antarsiswa, bahkan berpotensi memengaruhi kesehatan mental anak. Karena itu, pengaturan penggunaan gawai di sekolah merupakan ikhtiar yang patut didukung. Kebijakan tersebut juga relevan dengan kondisi penggunaan gawai di kalangan anak Indonesia yang sudah berada pada tingkat mengkhawatirkan.

Boleh dijelaskan seberapa meng-

khawatirkannya?

Berdasarkan data Badan Kependidikan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBKN) Tahun 2025, rata-rata anak Indonesia menggunakan gawai selama 7,8 jam per hari. Sementara itu, data Kemendikdasmen Tahun 2025 menunjukkan rata-rata penggunaan mencapai 7,3 jam per hari. Angka tersebut jauh melampaui rekomendasi para pakar yang menganjurkan durasi penggunaan gawai pada anak sekitar 2-3 jam per hari, di luar kebutuhan pembelajaran. Artinya, paparan layar gawai lebih dari empat jam sehari dapat memengaruhi tingkat kecemasan dan perilaku agresif anak. Ini menjadi alarm bagi semua pihak untuk membangun kebiasaan digital yang lebih sehat.

Bagaimana dengan usulan agar kebijakan ini bukan sekadar imbauan, melainkan larangan membawa gawai ke sekolah?

Pembatasan tidak boleh dimaknai sebagai pelarangan total. Pemanfaatan teknologi tetap menjadi bagian dari proses pembelajaran sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Literasi

digital tetap menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki peserta didik. Karena itu, yang dibangun adalah kedisiplinan dan etika dalam menggunakan teknologi, bukan menjauhkan anak dari teknologi.

Lantas, seperti apa penerapannya?

Kami mendorong Kemendikdasmen untuk segera menyusun pedoman implementasi yang lebih rinci agar pelaksanaan surat edaran dapat berjalan efektif di berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda. Pedoman tersebut perlu memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk menyesuaikan pengaturan penggunaan gawai berdasarkan jenjang pendidikan, kebutuhan pembelajaran, serta kondisi masing-masing sekolah.

Selain itu, hal apa lagi yang perlu diatur dalam pelaksanaan aturan pembatasan gawai di sekolah?

Perlu diperhatikan pendampingan kepada guru dan kepala sekolah, agar kebijakan ini tidak berhenti pada pengaturan tata tertib, tetapi menjadi bagian dari pembentukan karakter dan budaya digital yang bertanggung jawab. ■ **NMM**

“Dengan adanya larangan membawa HP ke sekolah, siswa terdorong membaca materi di rumah dan memahaminya terlebih dahulu.”

Apa tanggapan Anda terhadap langkah Kemendikdasmen terkait pembatasan penggunaan gawai untuk meningkatkan ruang interaksi di sekolah?

Secara umum, kebijakan ini sangat positif. Bahkan, di tempat saya sudah diterapkan sejak dua tahun lalu. Kami melihat dampak dari kebebasan membawa HP yang semula digunakan untuk pembelajaran ternyata lebih banyak menimbulkan dampak negatif.

Dampak negatifnya seperti apa?

Banyak hal yang sebenarnya tidak bisa dihindarkan melalui HP. Terutama seperti yang disampaikan Kementerian. Di dalam kelas saja, saat anak bermain HP, guru kesulitan mengendalikan. Apalagi saat jam istirahat, mereka justru sibuk dengan HP masing-masing. Akibatnya, sekolah sebagai ruang interaksi antarsiswa saat istirahat tidak berfungsi secara optimal. Karena itulah, sejak dua tahun lalu kami sudah menyarankan larangan membawa HP ke sekolah.

Apakah larangan membawa gawai ini efektif?



Sangat efektif untuk mengurangi aktivitas yang tidak kami inginkan. Sementara itu, edaran Kementerian yang baru justru kami nilai masih setengah hati.

Maksudnya bagaimana?

Karena yang diatur adalah siswa boleh membawa HP, tetapi dikontrol oleh guru. Pola seperti ini sudah pernah kami terapkan pada awal pelaksanaan. Namun, ternyata sangat menyulitkan. Sekolah harus menyiapkan tempat penyimpanan HP, sementara pengelolannya menjadi tugas tambahan bagi guru maupun pegawai. Penyimpanan HP juga tidak bisa dilakukan sembarangan karena membutuhkan tempat yang memadai, keamanan, dan pengelolaan yang baik.

Bagaimana jika ada tugas yang membutuhkan gawai?

Lebih baik dibuat aturan larangan membawa HP ke sekolah. Namun, apabila guru membutuhkan penggunaan HP untuk pembelajaran, siswa dapat diminta membawanya pada hari tertentu. Dengan begitu penggunaan-nya lebih mudah dikendalikan.

Dengan penerapan larangan membawa gawai, apakah interaksi antarsiswa menjadi lebih baik?

Kami sangat merasakan manfaatnya. Karena tidak memegang HP, mereka lebih banyak mengontrol dan beraktivitas bersama. Bahkan, bukan hanya interaksi yang meningkat, tetapi guru juga lebih mudah mengendalikan proses pembelajaran. Kami tetap memberikan materi literasi melalui HP, tetapi ketika penggunaannya diatur, sikap siswa juga berbeda.

Apa perbedaannya?

Misalnya, ketika kami mengirimkan materi literasi ke grup WA, keresakan paginya mereka harus menceritakan kembali isi materi tersebut. Dahulu, karena mereka membawa HP ke sekolah, sering kali mereka tidak membaca materi di rumah, tetapi baru membacanya di sekolah. Walaupun terlihat positif, kebiasaan itu kurang baik dalam membangun budaya literasi. Dengan adanya larangan membawa HP ke sekolah, siswa terdorong membaca materi di rumah dan memahaminya terlebih dahulu. ■ **NMM**